

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan merupakan indikator utama dalam suatu negara. Masyarakat dan pemerintah sangat mengharapkan adanya pengelolaan keuangan yang baik demi kemajuan dan keberlangsungan suatu negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dibutuhkan adanya perencanaan pengelolaan keuangan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pengelolaan tahunan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, “APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran”. Pendapatan negara yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sedangkan belanja negara yang merupakan pengurang dari nilai kekayaan bersih negara terdiri atas belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa. Salah satu komponen dari belanja pemerintah pusat ialah belanja pegawai.

Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai keperluan pegawai berupa kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun diluar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Salah satunya yaitu belanja gaji pegawai.

Gaji merupakan komponen utama bagi pencari kerja sebagai bentuk apresiasi dalam bekerja baik bagi pegawai kontrak maupun pegawai negeri sipil. Gaji pokok pegawai negeri sipil dibayarkan secara berkala pada setiap bulan dengan besarnya gaji pokok yang didapatkan sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai. Selain mendapatkan gaji pokok, pegawai negeri sipil juga mendapatkan tunjangan berupa tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Besaran gaji pokok, tunjangan, dan iuran wajib pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Penggajian pegawai memiliki sistem yang berbeda-beda pada setiap perusahaan ataupun instansi. Sistem penggajian pada umumnya digolongkan menjadi tiga yaitu sistem skala tunggal, sistem skala ganda, dan sistem penggajian campuran. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai berpangkat sama tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan beratnya tanggungjawab pekerjaan. Sistem skala

ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggungjawab pekerjaan. Sistem penggajian campuran merupakan gabungan dari sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem ini gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang memikul tanggungjawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar berupa daftar gaji induk yang dikeluarkan setiap bulan oleh satuan kerja di mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.

Dalam sistem penggajian terdapat prosedur yang harus dilalui untuk pencairan gaji pegawai. Pencairan ini dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta realisasi anggaran yang berpusat pada bagian keuangan. Prosedur ini dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tahapan dan sistemnya berdasarkan kebijakan masing-masing instansi/lembaga. Salah satu lembaga yang menerapkan sistem penggajian adalah BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. BPK sangat erat hubungannya dengan keuangan

negara termasuk pengawasan dalam keuangan. BPK memiliki kebijakan tersendiri dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil. Namun belum diketahui bagaimana sistem penggajian pegawai pada lembaga tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Prosedur pencairan dana gaji Pegawai Negeri Sipil terhadap belanja pegawai?

## **1.3 Tujuan Magang**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam kerja lapangan pada instansi pemerintahan.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja berupa pengaplikasian ilmu yang didapat dibangku perkuliahan terhadap kegiatan yang dilakukan.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dari DIII Keuangan untuk melakukan kegiatan magang sebagai mata kuliah wajib dari Jurusan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem yang digunakan dalam penggajian Pegawai Negeri Sipil.
3. Untuk menulis laporan Tugas Akhir yang menjadi prasyarat ujian kompre mahasiswa DIII Ekonomi Universitas Andalas.

## 1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang antara lain :

### 1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Untuk meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi dan bersosialisasi dalam lingkungan magang atau lingkungan kerja.
2. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan relasi, serta pengalaman mahasiswa dalam lingkungan kerja.

### 1.4.2 Manfaat Bagi Instansi/Lembaga

1. Terbantunya pekerjaan pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
2. Memberikan kemudahan untuk mengenalkan lebih dalam tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat kepada khalayak umum terutama pada lingkungan mahasiswa.

## **1.5 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang**

Kegiatan magang ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang selama 43 hari kerja yang dimulai dari tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 dengan ketentuan jam kerja dari hari senin sampai hari jumat pada pukul 08.00 WIB - 16.30 WIB. Selama kegiatan magang ini penulis ditempatkan pada Sub Bagian Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.6 Data yang dibutuhkan**

Beberapa data yang penulis butuhkan yaitu data Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, data sistem yang digunakan dalam penggajian pegawai berupa perhitungan gaji pokok pegawai ditambah dengan tunjangan pegawai serta perhitungan pemotongan gaji pegawai, dan data prosedur pencairan dana gaji pegawai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.7 Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

#### **a. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi ini diperlukan untuk mendapatkan data mengenai alur pencairan dana gaji pegawai negeri sipil dan contoh format surat

permintaan pembayaran serta contoh format surat perintah membayar gaji pegawai negeri sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur disebut sebagai suatu wawancara terfokus. Dalam wawancara ini pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagai pedoman wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara yang penulis lakukan guna mengumpulkan data tentang sistem penggajian pegawai berupa gaji pokok berdasarkan golongan, perhitungan tunjangan, dan pemotongan gaji hingga gaji bersih yang diterima pegawai. Penulis melakukan wawancara kepada staf sub bagian SDM yang bertanggungjawab dalam perhitungan gaji pegawai dan staf sub bagian keuangan yang bertanggungjawab dalam penggajian pegawai negeri sipil BPK Perwakilan Provinsi Sumatera barat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berisi teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan penulis bahas. Penulis memanfaatkan fasilitas perpustakaan guna mendapatkan buku yang terkait.

2. Metode Analisis Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu berupa pandangan, uraian, dan

paparan dari penulis terhadap data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang menjadi pedoman penulis.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian belanja pegawai, klasifikasi belanja pegawai, ketentuan pemerintah yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan pegawai, sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil, dan Prosedur Pencairan gaji pegawai.

Bab III membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan tentang visi dan misi lembaga, struktur organisasi lembaga, dan penjelasan mengenai sejarah lembaga.

Bab IV merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang hasil data yang diperoleh dengan menggunakan uraian berdasarkan fakta yang ditemukan. Dalam bab ini penulis juga memaparkan analisis terhadap data dengan teori yang terkait.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.